

WACANA MENGENAI *HUMAN TRAFFICKING* DALAM FILM “JAMILA DAN SANG PRESIDEN”

Rosa Oktaviani Tanesia, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Petra
Surabaya

Ocha_Okttan@hotmail.com

Abstrak

Film *Jamila dan Sang Presiden* dibuat berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet mengenai *human trafficking* di Indonesia. *Human trafficking* adalah salah satu permasalahan yang masih belum bisa teratasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana wacana mengenai *human trafficking* dalam film *Jamila dan Sang Presiden*. Untuk itu, digunakan metode analisis wacana kritis model Sara Mills. Penelitian ini menemukan ketidakberpihakan peran negara kepada seorang perempuan korban *human trafficking* yang berdampak pada aspek moral, gender, dan makin maraknya kasus *human trafficking*. Kontribusi penelitian ini agar perempuan harus berjuang dengan atau tanpa bantuan pihak lain untuk bisa memperbaiki kondisi yang tidak baik ini. Di mana perempuan diperlakukan tidak adil, dieksploitasi, tidak bisa memperoleh haknya, dan dimarjinalkan.

Kata Kunci: Analisis Wacana, *Human Trafficking*, Feminisme, Peran Negara, Film *Jamila dan Sang Presiden*.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara pengirim, transit dan tujuan industri perdagangan manusia. Sebagian besar korban, baik yang internal maupun eksternal, adalah perempuan dan anak yang diperdagangkan untuk bekerja di rumah tinggal atau eksploitasi seksual. Perdagangan manusia di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia semakin dipandang oleh pemerintah dan komunitas internasional sebagai masalah besar dan pelanggaran serius terhadap hak azasi manusia (HAM) (“*International Organization for Migration (IOM) Indonesia Annual Report 09*”, 2009).

Maraknya masalah mengenai *human trafficking* di Indonesia, membuat para sineas film Indonesia seperti Gareth Evans dan Alyandra, tergerak untuk mengangkat isu *human trafficking* kedalam sebuah film. Salah satu sineas film yang berhasil menyuguhkan fakta mengenai kasus *human trafficking* di Indonesia adalah Ratna Sarumpaet. Selama tahun 2005, dengan bantuan UNICEF Ratna melakukan penelitian tentang berita *human trafficking* di Indonesia. Dari hasil penelitian itu, 2006 Ratna menulis naskah Drama "*Pelacur dan Sang Presiden*" dan dipentaskan di lima kota besar di Indonesia. Tahun 2008 – 2009 Ratna memperjuangkan skenarionya itu bisa diwujudkan dalam film layar lebar dan

berhasil. Dia menyutradarai sendiri film tersebut dan diberi judul “Jamila dan Sang Presiden” (*Wikipedia Indonesia*, n.d., par. 5).

Menurut Sobur:

Film sebagaimana media massa lainnya, lahir sebagai hasil reaksi dan persepsi pembuatnya dari peristiwa atau kenyataan yang terjadi di sekelilingnya, lalu dari film tersebut akan lahir suatu kenyataan baru yang merupakan suatu realitas kamera. Pandangan seperti ini menyiratkan bahwa realita yang diekspresikan dalam film bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan adalah hasil dari suatu cara tertentu dalam mengkonstruksikan realitas. Dengan demikian film bukan semata-mata memproduksi realitas, tetapi juga mendefinisikan realitas (Sobur, 2003. p. 127-128).

Sebelumnya, telah ada beberapa penelitian mengenai film *Jamila dan Sang Presiden* ini. Beberapa penelitian tersebut diantaranya dilakukan oleh Dwi Riyati (2011) melalui penelitiannya yang berjudul *Aspek Pendidikan Moral dalam Perspektif Gender (Analisis Semiotik terhadap Film Jamila dan Sang Presiden)* dengan menggunakan metode penelitian yaitu metode semiotika yang memiliki tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan aspek pendidikan moral dalam perspektif *gender* pada film *Jamila dan Sang Presiden*.

Yansen Marthadinata (2010) juga melakukan penelitian terhadap film ini dengan judul penelitian *Analisis Framing Tentang Trafficking Dalam Film Jamila dan Sang Presiden*. Pada penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian analisis *framing* atau *frame* atau bingkai dengan Model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dengan empat unsur yang digunakan dalam pengungkapan isi yang dikomunikasikan dalam cerita film tersebut yaitu sintaksis, skrip, retorik dan leksikon/pilihan kata, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penggambaran tema *trafficking* yang diangkat dalam Film *Jamila dan Sang Presiden*.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Husninatul Ghassani (2010) dengan judul penelitian *Kekerasan Terhadap Perempuan: Analisis Semiotika Film Jamila dan Sang Presiden* dengan menggunakan metode analisis semiotik yang lebih fokus melihat pada tanda-tanda dalam film yang bisa merepresentasikan kekerasan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan representasi kekerasan terhadap perempuan dan membongkar ideologi tersembunyi perlawanan perempuan yang dikonstruksikan melalui film *Jamila dan Sang Presiden*.

Melihat dari penelitian – penelitian terdahulu, sejauh observasi peneliti, belum pernah ada penelitian yang membahas mengenai wacana *human trafficking* secara keseluruhan dalam film ini. Maka, dengan latar belakang diatas peneliti ingin meneliti wacana mengenai *human trafficking* dalam Film *Jamila dan Sang Presiden*. Menurut Einsenhart dan Johnstone dalam Ida (2011) para ahli bahasa atau linguistik mengartikan “*Discourse* sebagai contoh-contoh aktual dari ujaran, pembicaraan, tulisan atau komunikasi linguistik dalam medium-medium yang

berbeda” (Ida, 2011. p:61). Analisis wacana kritis melihat wacana, pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai bentuk dari praktik sosial.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini ingin melihat bagaimana wacana mengenai *human trafficking* dalam film *jamila dan sang presiden*?

Tinjauan Pustaka

Film Sebagai Komunikasi Massa

Menurut Sobur:

Dari permulaan sejarahnya film dengan lebih mudah dapat menjadi alat komunikasi yang sejati karena ia tidak mengalami unsur-unsur teknik, politik, ekonomi, sosial, dan demografi yang merintangai kemajuan surat kabar pada masa pertumbuhannya dalam abad ke-18 dan permulaan abad ke-19 (Sobur, 2009, p. 126).

Kemudian Sobur melanjutkan:

Kekuatan dan kemampuan film menjangkau banyak segmen sosial, lantas membuat para ahli mengatakan bahwa film memiliki potensi untuk mempengaruhi khalayaknya (Sobur, 2009, p. 127).

Michael Real mengungkapkan

Film merupakan *mass mediated culture* yaitu penggambaran budaya sebagaimana adanya seperti yang terdapat dalam berbagai media massa kontemporer, baik tentang golongan elit, awam, orang terkenal, ataupun budaya asli masyarakat. Film juga mampu menjadi agen sosialisasi yang mampu melewati atau melampaui agen-agen sosialisasi tradisional dalam masyarakat seperti keluarga, sekolah, atau ajaran agama, dan membangun hubungan langsung dengan individual (Real, 1996, p.89).

Human Trafficking dalam Media Massa

Selama ini, *Human trafficking* sering disalah artikan sebagai bentuk penyelundupan orang secara ilegal. Sebenarnya, arti *human trafficking* lebih dari itu. Para pelaku sering memindahkan para korban mereka dari satu tempat ke tempat lain dengan tidak ada rasa berdosa sedikit pun. Yang menjadi korban *human trafficking* adalah orang-orang yang dieksploitasi melalui kekerasan, penipuan, dan paksaan. Para pelaku mengambil keuntungan dari para korban dengan cara menjual mereka menjadi pekerja seks atau pekerja paksa (Farrell, 2011).

Salah satu wadah untuk menayangkan atau menyajikan kasus-kasus mengenai *human trafficking* adalah media. Berdasarkan situs resmi milik *The United Nations Global Initiative to Fight Human trafficking* (UN.GIFT), media selalu memiliki peran dalam mendidik orang-orang tentang banyak manifestasi

perdagangan manusia sebagai isu global, media menyajikan semua masalah mengenai manusia dan semua hal yang menyakitkan dari mereka. Namun, liputan media masih lemah dalam beberapa bagian dunia. Beberapa berita media masih lemah dalam hal belum menyadari mengenai *human trafficking* atau masih bingung dengan isu-isu lain seperti migrasi ilegal dan penyelundupan orang asing. Sebenarnya, media memiliki peranan yang besar untuk mendominasi dukungan publik dan keterlibatan mereka untuk membantu mencegah dan memerangi perdagangan manusia. Karena jangkauan dan kemampuan untuk meraih pendapat publik itulah, alat yang ampuh untuk melakukan perubahan sosial. Jurnalisme investigatif pada perdagangan manusia perlu dipromosikan. Namun, publisitas media harus mempertimbangkan pendekatan terhadap hak dan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran pada hak-hak para korban. Jadi, ada kebutuhan untuk mengembangkan standar minimum untuk media dalam memberitakan mengenai *human trafficking* (*How The Media Reports Human trafficking*, 2006).

Analisis Wacana

Menurut tulisan Hawthorn, “wacana adalah perbincangan atau tulisan yang dapat dilihat dari sisi kepercayaan, nilai-nilai, dan semua kategori yang mewadahnya” (Mills, 1997. p:5). Sementara itu Crystal, melihat analisis wacana lebih memfokuskan pada struktur yang secara alamiah terdapat pada bahasa lisan, sebagaimana banyak terdapat dalam wacana seperti percakapan, wawancara, komentar, dan ucapan-ucapan. Hawthorn berpendapat, bahwa wacana adalah komunikasi kebahasaan yang terlibat sebagai sebuah pertukaran diantara pembicara dan pendengar, sebagai sebuah aktivitas personal dimana bentuknya ditentukan oleh tujuan sosialnya (Badara, 2012).

Dari beberapa uraian diatas, maka terangkum bahwa analisis wacana ialah telaah mengenai aneka fungsi (pragmatik) bahasa. Stubbs mengatakan, analisis wacana merupakan suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selanjutnya, Stubbs menjelaskan bahwa analisis wacana menekankan kajian penggunaan dalam konteks sosial, khususnya dalam interaksi antar-penutur. Senada dengan pendapat Stubbs, Cook menyatakan bahwa analisis wacana merupakan kajian yang membahas tentang wacana sedangkan wacana merupakan bahasa yang digunakan berkomunikasi (Badara, 2012).

Analisis Wacana Kritis

Analisis wacana kritis, lebih terfokus pada kekuatan hubungan dan cara untuk membentuk produksi dari ucapan dan teks, tapi metodologi mereka sudah terpengaruh oleh linguistik dan teori kultural, dan mereka mampu memberikan model yang lebih kompleks dari fungsi wacana dan efek bagi para penggunanya (Mills, 1997).

Analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*), tidak dipahami semata sebagai studi bahasa. Analisis wacana kritis di sini memang menggunakan bahasa

dalam teks untuk dianalisis, tetapi bahasa yang dianalisis disini agak berbeda dengan studi bahasa dalam pengertian linguistik tradisional. Bahasa dianalisis bukan dengan menggambarkan semata dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Konteks disini berarti bahasa itu dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk didalamnya praktik kekuasaan (Eriyanto, 2001).

Analisis Wacana Model Sara Mills

Sara Mills menganalisis wacana pada bagaimana posisi-posisi aktor ditampilkan dalam teks. Posisi-posisi ini dalam arti siapa yang menjadi subjek penceritaan dan siapa yang menjadi objek penceritaan akan menentukan bagaimana struktur teks dan bagaimana makna diperlakukan dalam teks secara keseluruhan. Selain itu, Sara Mills juga memusatkan perhatian pada pembaca dan penulis yang ditampilkan dalam teks. Bagaimana pembaca mengidentifikasi dan menempatkan dirinya dalam penceritaan teks. Posisi semacam ini akan menempatkan pembaca pada salah satu posisi dan mempengaruhi bagaimana teks itu hendak dipahami dan bagaimana pula aktor sosial ini ditempatkan. Pada akhirnya cara penceritaan dan posisi-posisi yang ditempatkan dan ditampilkan dalam teks ini membuat satu pihak menjadi *legitimate* dan pihak lain menjadi *illegitimate* (Eriyanto, 2001).

Konsep subjek-objek, yaitu kita perlu mengkritisi bagaimana peristiwa ditampilkan dan bagaimana pihak-pihak yang terlibat itu diposisikan dalam teks. Posisi di sini maksudnya siapakah aktor yang dijadikan sebagai subjek yang mendefinisikan dan melakukan penceritaan dan siapakah yang ditampilkan sebagai objek, pihak yang didefinisikan dan digambarkan kehadirannya oleh orang lain. Konsep kedua yang menjadi perhatian Mills adalah posisi pembaca. Bagi Mills, teks adalah hasil negosiasi antara penulis dan pembaca. Oleh karena itu, pembaca tidak dianggap semata sebagai pihak yang hanya menerima teks, tetapi juga ikut melakukan transaksi sebagaimana akan terlihat dalam teks (Eriyanto, 2001).

Metode

Konseptualisasi Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis wacana kritis model Sara Mills. Analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*), di mana bahasa dianalisis bukan dengan menggambarkan semata dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Konteks yang dimaksud adalah bagaimana bahasa itu dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk didalamnya praktik kekuasaan (Eriyanto, 2001). Sara Mills lebih melihat bagaimana posisi-posisi aktor ditampilkan dalam teks. Posisi-posisi yang dimaksud adalah siapa yang menjadi subjek penceritaan dan siapa yang menjadi objek penceritaan akan menentukan bagaimana struktur teks dan bagaimana makna diperlakukan dalam teks secara keseluruhan. Selain posisi-posisi aktor

dalam teks, Sara Mills juga memusatkan perhatian pada posisi pembaca dan penulis ditampilkan dalam teks (Eriyanto, 2001).

Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah film *Jamila dan Sang Presiden* yang Sedangkan objek dari penelitian ini adalah wacana *human trafficking* dalam film ini yang dilihat melalui tokoh-tokoh dan dialog yang berkaitan dengan *human trafficking*.

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kerangka pemikiran milik Sara Mills yang memandang wacana melalui dua konsep yakni posisi subjek-objek, dan posisi penulis-pembaca. Posisi subjek-objek yaitu melihat bagaimana peristiwa dilihat, dari kaca mata siapa peristiwa itu dilihat. Siapa yang diposisikan sebagai pencerita (subjek) dan siapa yang menjadi objek yang diceritakan. Apakah masing-masing aktor dan kelompok sosial mempunyai kesempatan untuk menampilkan dirinya sendiri, gagasannya, ataukah kehadirannya, gagasannya ditampilkan oleh kelompok/orang lain. Sedangkan posisi penulis-pembaca yaitu melihat bagaimana posisi pembaca ditampilkan dalam teks. Bagaimana pembaca memosisikan dirinya dalam teks yang ditampilkan. Kepada kelompok manakah pembaca mengidentifikasi dirinya (Eriyanto, 2001).

Temuan Data



Gambar 4.23. Jamila kecil saat diperlakukan tidak menyenangkan oleh mucikari yang membelinya.

Sumber: (Film *Jamila dan Sang Presiden*, 2009)



Gambar 4.46. Para pendemo berteriak menuntut Jamila dihukum mati.

Sumber: (Film *Jamila dan Sang Presiden*, 2009)



Gambar 4.51. Jamila di rumah bordil Kalimantan
Sumber: (Film *Jamila dan Sang Presiden*, 2009)



Gambar 4.60. Jamila mengarahkan pistol itu ke dada Nurdin dan menembakkannya.

Sumber: (Film *Jamila dan Sang Presiden*, 2009)



Gambar 4.63. Agen pedagang anak sedang mengumpulkan korbannya.

Sumber: (Film *Jamila dan Sang Presiden*, 2009)

Analisis dan Interpretasi

Sebagai aktivis perempuan yang sudah melakukan survei terhadap *human trafficking* Ratna tentu sudah menemukan fakta bahwa korban *human trafficking* adalah sebagian besar perempuan. Melalui film ini, Ratna ingin mengatakan pada khalayak, bahwa *human trafficking* masih belum bisa teratasi bahkan memakan korban secara terus menerus khususnya perempuan baik itu anak maupun dewasa. Hal itu bisa terlihat pada epilog film di gambar 4.63 di mana kisah mengenai *human trafficking* pada perempuan tidak hanya berhenti pada kasus Jamila tapi terus berkembang pada nasib perempuan-perempuan lain yang menjadi korban. Salah satu korban yang diceritakan dalam film juga ada Fatimah, adik Jamila beserta pada perempuan lain yang bekerja di rumah bordil di Kalimantan seperti yang diungkapkan dalam film melalui percakapan antara Jamila dan Ria.

Kondisi-kondisi yang Ratna sajikan dalam film ini menjadi kritikan tersendiri pada peranan sebuah negara yang sudah memiliki dasar teorinya sendiri. Negara adalah “*agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kerjasama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan”

(Budiardjo, 2003. p. 38). Jika merujuk pada teori tersebut, maka seharusnya dalam film ini, saat puluhan bahkan ribuan orang berdemo menghujat dan mengecam Jamila ada pihak-pihak pemerintahan yang mampu menghentikan tindakan anarkis ini, namun dalam film tidak ditampilkan peranan pihak penegak keadilan dan ketertiban tersebut mereka hanya ditampilkan sekali saja dalam film itu pun dalam adegan para polisi sedang menjaga pintu gerbang Lapas Budiluhur saja. Dalam film malah diceritakan pihak pendemo bisa dengan lantang dan leluasa mendemo Jamila bahkan membuat gaduh persidangan Jamila dan terus menerus tampil dilayar kaca untuk menghujat Jamila seperti pada gambar 4.46.

Belakangan dalam film ini kemudian diceritakan bahwa Faisal sang koordinator demo forum pemuda berlatar agama tersebut adalah orang yang sengaja dibayar untuk mempersuasi sekelompok orang agar mau menghujat Jamila demi mempertahankan citra seseorang. Semua itu menjadi satu kesatuan yang ingin mengatakan bahwa di negara ini kekuasaan dapat memarginalkan posisi seseorang. Jamila adalah rakyat biasa yang terpaksa menjadi korban kekejian orang tuanya yang dengan sengaja menjualnya karena desakan ekonomi keluarga yang memburuk. Kemudian dia terpaksa menjadi seorang pelacur karena ia ingin menemukan adiknya yang diduga bekerja di sebuah rumah bordil di Kalimantan. Semua yang menimpa kehidupan Jamila adalah karena ada kuasa yang bertindak memarginalkan.

Nampaknya keadaan di mana banyak pihak yang menonjolkan kekuasaannya sejalan dengan teori negara yang mengatakan bahwa negara bukan sebuah lembaga yang mandiri. Karena kebijakan yang dihasilkan negara ditentukan oleh faktor eksternal atau faktor diluar dirinya sendiri. Negara hanya sekedar arena di mana kekuatan-kekuatan sosial berusaha saling bertanding untuk menguasai. Dia hanya semacam *tabula rasa*, sehelai kertas putih yang siap ditulisi oleh orang lain. orang lainlah yang akan menulis diatas kertas tersebut, bukan kertas itu sendiri (Budiman, 2002).

Dalam film ini memang terlihat negara ini seperti sebuah arena di mana berbagai pihak saling bertanding untuk mempertahankan kekuasaannya. Pemerintah dan lembaga keagamaan yang memiliki kuasa sangat besar di Negara ini terlihat pada gambar 4.46, saat mereka berdemo, bersikeras untuk melumpuhkan Jamila dan membuat kasus ini menjadi kasus politik yang harus segera dituntaskan dengan menghukum mati Jamila. Mereka bertanding dengan pihak yang bersimpati pada Jamila yang memohon agar grasi dapat diberikan padanya. Tujuan dari pertandingan ini hanya satu, mempertahankan citra seorang menteri yang memiliki pendamping hidup seorang pelacur. Tapi akhirnya, pihak minoritas lah yang harus kalah. Kalah dengan kekuatan massa yang begitu besar dan kalah dengan pemerintah yang tidak mau mengusut tuntas peristiwa pembunuhan tersebut.

Film *Jamila dan Sang Presiden* ini juga sarat akan penyimpangan terhadap hak asasi perempuan. Fokus cerita di film ini ada Jamila yaitu seorang perempuan korban *human trafficking* maka dari itu penyimpangan terhadap hak asasi perempuan sangat terlihat jelas di film ini. Konsep Hak Asasi Perempuan (HAP)

sebenarnya memiliki dua makna terkandung. Yang pertama, Hak Asasi Perempuan hanya dimaknai sekedar berdasarkan akal sehat. Logika yang dipakai adalah pengakuan bahwa perempuan adalah manusia, sehingga sudah sewajarnya mereka juga memiliki hak asasi. Namun dalam realitasnya memperlihatkan tidak serta merta pengakuan bahwa perempuan adalah manusia juga berdampak terhadap perlindungan hak-hak dasar mereka sebagai manusia. Maka yang kedua, di balik istilah Hak Asasi Perempuan terkandung visi dan maksud transformasi relasi sosial melalui perubahan relasi kekuasaan yang berbasis *gender* (Budiardjo, 2008).

Hak asasi perempuan di Indonesia cukup menonjol karena sudah termasuk dalam UUD 1945 yang secara formal mengatakan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan pasal 27 UUD 1945 misalnya, dengan tegas mengatakan bahwa semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum. Namun, dalam praktiknya perempuan masih banyak mengalami diskriminasi. Bisa dikatakan, kedudukan perempuan secara *de jure* jauh berbeda dengan kedudukannya secara *de facto*. Sebenarnya, kedudukan perempuan di Indonesia secara formal cukup kuat sebab banyak ketentuan dalam berbagai undang-undang serta peraturan lain yang memberi perlindungan yuridis padanya. Selain itu, Indonesia pun telah meratifikasi dua perjanjian, yaitu Perjanjian mengenai Hak Politik Perempuan (*Convention on the Political Rights of Women*) dan Perjanjian mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Political Elimination of All Forms of Discrimination against Women* atau CEDAW). Ada tiga isu utama yang berkaitan dengan hak perempuan di Indonesia, yakni kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, kewarganegaraan, dan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak. Meski membutuhkan waktu yang panjang, pada akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemetintah (Presiden Republik Indonesia) mengesahkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT); Undang-undang No. 12 Tahun 2006, tentang Kewarganegaraan RI; dan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (PTPPO) (Budiardjo, 2008).

Sesuai dengan penjelasan yang sudah terurai diatas, film ini pun mengkritik mengenai masalah Hak Asasi Perempuan sebagai manusia. Hal ini terwakili melalui tokoh Jamila yang sejak kecil sudah kehilangan hak sebagai perempuan dan manusia di mana ia telah dijual oleh ayahnya sendiri kepada mucikari seperti yang ia ceritakan pada Kyai Jalaluddin dalam film dan saat tinggal bersama mucikari tersebut pun Jamila kerap disiksa seperti pada gambar 4.23. Ketika ia telah tumbuh remaja hingga dewasa, ia juga kerap mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan yakni kekerasan yang telah dilakukan oleh keluarga Wardiman juga Nurdin.

Film ini juga menyinggung soal feminisme yang kemudian berkaitan dengan *gender*. Sebenarnya, teori feminisme terkonsentrasi pada analisis tentang hubungan kekuasaan dan bagaimana cara perempuan sebagai individu atau sebagai anggota kelompok yang berkaitan dengan kekuasaan. Namun kemudian

feminisme telah berubah dari yang hanya memandang wanita sebagai anggota yang tertekan, sebagai korban dari dominasi laki-laki, dan telah mencoba merumuskan cara untuk menganalisis kekuatan dalam diri wanita itu sendiri untuk menentang tekanan dalam kehidupan sehari-hari (Mills, 1997).

Tokoh Jamila di sini dipilih Ratna sebagai objek yang diceritakan mampu melakukan pemberontakan sebagai wujud dari kesadaran dan ekspresi diri melawan keputusan dan menentang ketidakadilan *gender* tersebut serta mampu untuk menentang tekanan dalam hidup yang sudah ia alami semasa hidupnya. Perlawanan terhadap ketidakadilan *gender* dan kekuatannya untuk menentang tekanan hidup tersebut bisa terlihat dari keberaniannya untuk membela sesamanya para korban *human trafficking* dengan bekerja di suatu LSM yang menangani kasus perdagangan manusia dan akhirnya ia berani menyamar menjadi pelacur untuk menyelamatkan adiknya dan perempuan lain korban *human trafficking* di Kalimantan seperti pada gambar 4.51. Bentuk pemberontakan dan perjuangan Jamila yang lain adalah saat ia tak segan untuk membunuh Nurdin yang telah melakukan kekerasan padanya dan telah mencampakannya di gambar 4.60. Hal ini menunjukkan bahwa Jamila sebagai seorang wanita yang selama ini telah mendapatkan tekanan dalam hidupnya, berani berjuang dan melakukan pemberontakan agar jangan sampai ada lagi wanita yang bernasib sama seperti dirinya.

Simpulan

Penelitian ini menemukan bahwa sebenarnya di Indonesia sendiri posisi perempuan khususnya seorang korban *human trafficking* masih menjadi hal yang dipersalahkan dan dimarginalkan oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini berkaitan dengan peran negara yang masih lemah dalam menanggulangi kasus *human trafficking*. Selain itu, pihak yang berkuasa masih mendominasi dan mampu melakukan kuasa apapun untuk memarginalkan posisi seorang perempuan korban *human trafficking*. Posisi semacam ini kemudian berkaitan lagi dengan feminisme, *gender*, dan pertarungan hak. Dimana seorang perempuan berjuang untuk melawan feminisme, melakukan pemberontakan atas ketidakadilan *gender* yang ia alami, dan memperjuangkan haknya sebagai seorang manusia.

Penelitian ini menemukan bahwa perempuan korban *human trafficking*, masih bisa berjuang dan patut untuk memperjuangkan hidupnya, hanya saja perjuangan itu harus terkalahkan dengan minimnya peran negara untuk membelanya. Namun masih ada pula pihak yang bersimpati pada perempuan tersebut. Hanya saja kedudukan para pihak yang bersimpati ini terkalahkan oleh kekuatan orang-orang berkuasa di negeri ini.

Daftar Referensi

- Badara, A. (2012). *Analisis wacana: Teori, metode, dan penerapannya pada wacana media*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

- Budiman, A. (2002). *Teori negara: Negara, kekuasaan, dan ideologi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik (Ed. Revisi)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Eriyanto. (2001). *Analisis wacana: Pengantar analisis teks media*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta
- Farrell, C. (2011). *Human trafficking*. USA: Library Of Congress Cataloging-in-Publication Data
- Ida, R. (2011). *Metode penelitian: Kajian media dan budaya*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP)
- Mills, S. (1997). *Discourse: The new critical idiom*. New York: Routledge
- Real, M. (1996). *Exploring media culture*. USA: Sage Publications
- Sarumpaet, R (Producer). (2009). *Jamila dan sang presiden*. [Videotape]. Jakarta: Satu Merah Panggung & MVP Pictures.
- Sobur, A. (2006). *Analisis teks media: Suatu pengantar untuk analisis wacana, analisis semiotik, dan analisis framing*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sobur, A. (2009). *Semiotika komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya